



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 02 November 2024

Halaman: 2

Penerapan Retribusi Sampah di Depo Dinilai Tidak Tepat

DEMI KEBAIKAN BERSAMA

- Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto tidak menampik, kebijakan pembayaran retribusi pada depot menimbulkan gejolak di masyarakat.
- Biaya retribusi nantinya akan dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Kontribusi yang ada akan dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan sampah.

GRAFIS: HEBPI KARTUNYADAR JOGJA

JOGJA - Anggota DPRD Kota Jogja menilai rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk menerapkan retribusi pembuangan sampah pada depo-depo kurang tepat. Legislatif justru lebih mendorong agar pemkot memperbesar anggaran penanganan sampah daripada membebani masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengatakan, penerapan retribusi pembuangan sampah pada depo wajib dikaji ulang. Lantaran kebijakan tersebut nantinya akan sangat membebani masyarakat.

NAMA: NURWANTO/RADAR JOGJA

TRIYONO HARI KUNCORO
Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja

Pemkot Jogja memang tengah mengujicobakan retribusi sampah berbayar di depo. Namun untuk sekarang masyarakat belum dibebankan biaya. Baru model penimbangan sampah yang dibuang ke depo.

Kuncoro menilai, permasalahan sampah seharusnya bisa selesai dalam proses penganggaran. Bukan malah meminta masyarakat untuk membayar retribusi lagi. Terlebih selama ini juga sudah ada iuran rutin yang dibayarkan masyarakat. "Retribusi jang sampai dobel. Misal iuran rutinnya sudah lalu di satu tempat pembuangan kena lagi. Untuk kondisi sekarang saya rasa kurang tepat," ujar Kuncoro, kemarin (1/11).

Menurut politisi PKS itu, kurang tepatnya penerapan retribusi sampah pada depo karena sekarang pemkot juga belum maksimal dalam penanganan sampah. Itu dibuktikan dengan masih banyaknya depo yang penuh dengan tumpukan sampah.

Kuncoro menilai, apabila pemkot sudah maksimal dalam pengelolaan sampah, kemungkinan masyarakat juga tidak akan keberatan jika harus menambah retribusi. Sayangnya sampai saat ini pengelolannya tergolong masih semrawut. "Kalau sudah menunjukkan hasil Jogja benar bersih mungkin masyarakat akan mau ketika dinaikan (retribusinya), tapi kalau masih semrawut seperti sekarang jelas itu akan membebani lagi. Apalagi masyarakat juga sudah banyak membayar pajak," tegas Kuncoro.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko menerangkan, pasca masa uji coba, tidak menutup kemungkinan DLH Kota Jogja akan mengkaji ulang terkait penerapan retribusi sampah. (Inu/din/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005